



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Ff

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Patipi Pulau, RT. 002 Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.FF, tertanggal 05 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Patipi Pulau pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak **Kadir Patipi** selaku Ayah Kandung Pemohon II yang menyerahkan wali nikah

Hal. 1 dari 8 hal. Pent.Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapak taha daeng Husen untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah taha daeng Husen selaku Bapak Imam Mesjid Raya Fakfak;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Taha Bahmid dan Hasan Bauw;

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupauang Rp5.000 tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta sudah dikaruniai 2 anak yaitu

a. Hana Pratiwi Baraweri Binti Moh. Ali Anzhar Baraweri Bauw;

b. Fitra Fardani Patipi Bin Moh. Ali Anzhar Baraweri Bauw;

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor: 900/24/KAMP-P.PULAU-DTP/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi;

12. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon di ijinan berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 2 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Teluk Patipi, Distrik Teluk Patipi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2018;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak ;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan PNS alamat Wagom RT. 02 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah di Patipi Pulau pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama Bapak **Kadir Patipi** selaku Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak taha daeng Husen selaku Bapak Imam Mesjid Raya Fakfak;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah Taha Bahmid dan Hasan Bauw;

Hal. 3 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I untuk

Pemohon II berupauang Rp. 5.000 tunai

-Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus

jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

-Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak

ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah

bercerai;

-Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara dan saudara

sesusuan;

-Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

2 (dua) orang anak;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna

dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS

bertempat tinggal di Kampung Kayumera RT. 05 Kelurahan Danaweria Distrik

Fakfak Tengah Kabupaten Fakfakdi bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan Kakak Pemohon I;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri,

menikah di Patipi Pulau pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019;

-Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut

bernama Bapak **Kadir Patipi** selaku Ayah Kandung Pemohon II;

-Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak

taha daeng Husen selaku Bapak Imam Mesjid Raya Fakfak;

-Bahwa yang menjadi saksi-saksiadalahTaha Bahmid dan Hasan Bauw;

-Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I untuk

Pemohon II berupauang Rp. 5.000 tunai

-Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus

jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

-Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak

ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah

bercerai;

-Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara dan saudara

sesusuan;

-Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 di Patipi Pulau, dengan wali nikah Bapak **Kadir Patipi** selaku Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 5.000,-, dihadiri 2 orang saksi bernama Taha Bahmid dan Hasan Bauw, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan sekolah anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I

Hal. 5 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Patipi Pulau pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, dengan wali nikah Bapak **Kadir Patipi** selaku Ayah Kandung Pemohon II yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada taha daeng Husen selaku Bapak Imam Mesjid Raya Fakfak, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 5.000,-, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Taha Bahmid dan Hasan Bauw;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 6 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi di Patipi Pulau pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Ff. tanggal 22 Maret 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 di Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi, kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp **220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)** di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1442*Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal manshur Sudirman, S.H.I, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Manshur Sudirman, S.H.I

Panitera,

Marwah S.H

Hal. 9 dari 9 hal. Pent. Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)